



ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL, KETERGANTUNGAN FISKAL, DAN EFEKTIVITAS FISKAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2017-2022

Kumba Digidowiseiso¹, Nicolaus Petrus², Fitri Andriani³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

History Article

Article history:

Received Feb 03, 2023

Approved Feb 20, 2023

Keywords:

Fiscal Independence, Fiscal Dependence, Fiscal Effectiveness, First- Generation Theory

ABSTRACT

This research study aims to analyze the aspects of Fiscal Independence, Fiscal Dependence, and Fiscal Effectiveness of the North Kalimantan Province for the 2017-2022 period. This research is quantitative descriptive research. The average is obtained in the fiscal independence section with a value of 0.28, categorized as starting toward regional budgetary independence. Then the fiscal dependence portion of the percentage value obtained is 74,60% which is classified as a very high level of regional fiscal dependence. Furthermore, the fiscal effectiveness portion of the figure obtained is 101,23%, which means it is very effective in implementing the regional Fiscal. Overall, the review of fiscal independence, dependability, and effectiveness proves that there are fluctuating changes every year. Then justifies the influence of the First-Generation Theory in the review studied that the central government's intervention in the regional government of North Kalimantan Province still has an effect in various aspects intended in this study in the form of independence, dependence, and its fiscal effectiveness with the period of the year under study.

ABSTRAK

Kajian penelitian ini bertujuan menganalisis aspek Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pada bagian kemandirian fiskal rata-rata diperoleh dengan nilai 0,28 yang dikategorikan mulai menuju kemandirian untuk fiskal daerahnya. Lalu bagian ketergantungan fiskal nilai presentase yang diperoleh sebesar 74,60% yang dikategorikan sangat tinggi tingkat ketergantungan fiskal daerahnya. Dan bagian efektivitas fiskal angka yang diperoleh sebesar 101,23% yang berarti sangat efektif dalam pelaksanaan fiskal daerahnya. Secara keseluruhan tinjauan terhadap kemandirian, ketergantungan dan efektivitas fiskal

membuktinya adanya perubahan yang fluktuatif tiap tahunnya kemudian membenarkan pengaruh *First-Generation Theory* dalam tinjauan yang diteliti bahwa intervensi pemerintah pusat kepada pemda Provinsi Kalimantan Utara masih ada pengaruhnya dalam berbagai aspek yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa kemandirian, ketergantungan dan efektivitas fiskalnya dengan periode tahun yang diteliti.

© 2020 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: author@mail.com

PENDAHULUAN

Sebagai upaya dalam mengamati proses implementasi kebijakan otonomi di suatu daerah dimana peran pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam pengelolaan ekonomi di daerahnya, serta diberikan wewenang yang sifatnya mandiri mencakup pembangunan daerah itu sendiri, kemudian dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya serta urusan-urusan pemerintahan yang notabennya sejalan dengan tugas dan fungsi daerah tersebut. Kemudian pemberian wewenang ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

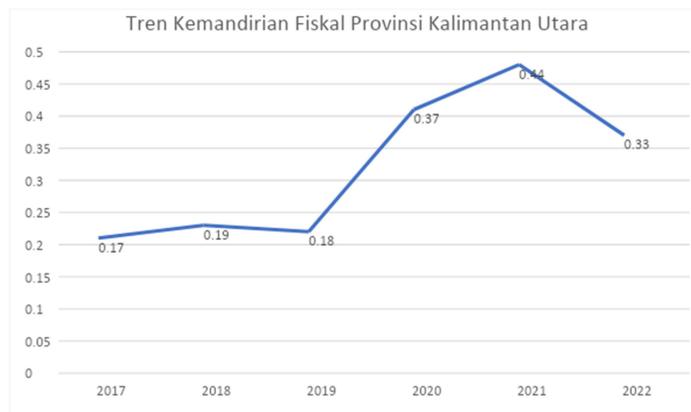
Akan tetapi terdapat sebuah acuan penting bagi pemerintah daerah itu sendiri adalah prinsip kehati-hatian, dimana masalah yang sering ditemui dalam tata kelola keuangan daerah dan penganggaran daerah adalah Kemandirian Fiskal yang cukup tinggi yang terindikasi masih dipengaruhi intervensi pemerintah pusat dalam proses pembangunan daerah. Kedua adalah Ketergantungan Fiskal yang ditemui sangat berpotensi kurang optimal dimana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda tidak terserap dengan baik, ironisnya menjadikan peranan pemda sangat pasif dalam mendayagunakan pendapatan asli daerahnya.

Kemudian masalah terakhir yaitu Efektivitas Fiskal secara umum berorientasi pada pengelolaan dana atau anggaran yang tidak tepat dengan sasaran serta tujuan yang ada, salah satu wujud nyata adanya otonomi daerah bertujuan pada aspek meliputi kemandirian daerah yang bisa lebih mandiri, lalu mampu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan kemampuan memaksimalkan anggaran yang diperoleh secara efektif dalam menjalankan program-program yang bermanfaat pada masyarakat di daerah yurisdiksinya.

Dengan beberapa aspek penting dalam otonomi daerah itu apa yang menjadi tanggung jawab daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya bisa selaras dengan tujuan daerah itu sendiri, sehingga tujuan utama dalam otonomi daerah bisa terwujud. Disamping itu pemisahan yang diberikan oleh UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan penegasan bahwa urusan keuangan pemerintah pusat dan pemda bisa terlihat dalam anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut, kenyataan yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir yakni periode 2017-2022 tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan bertahap, dimana tren presentase rata-rata berada

pada posisi $\leq 0,28$ ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara mulai menuju pada tingkat kemandirian yang dibantu oleh peranan pemerintah pusat kepada pemda.

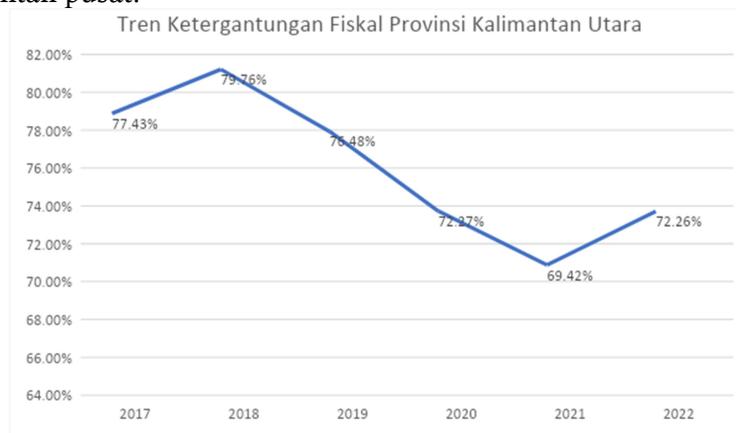


Gambar 1. Tren Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2022)

Kemudian tinjauan pada aspek Ketergantungan Fiskal di Provinsi Kalimantan Utara dimana, presentase diperoleh 74,60% rata-rata dari periode tahun 2017-2022 yang berarti masih sangat tinggi tingkat ketergantungan fiskalnya, tentunya ini menjadi tantangan bagi pemda yang bersangkutan agar lebih proaktif mengurangi ketergantungan fiskalnya.

Serta langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa mengurangi pengaruh dana yang diperoleh dari eksternal bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi yang ada di daerah sehingga apa yang menjadi fokus pemerintah daerah untuk bisa mengurangi ketergantungan fiskal bisa terwujud. Secara keseluruhan Ketergantungan Fiskal berkaitan dengan tingkat kemampuan suatu daerah yang diberikan tanggungjawab dalam hal mengelola pajak dan sistem dalam pelaksanaannya sehingga tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat.

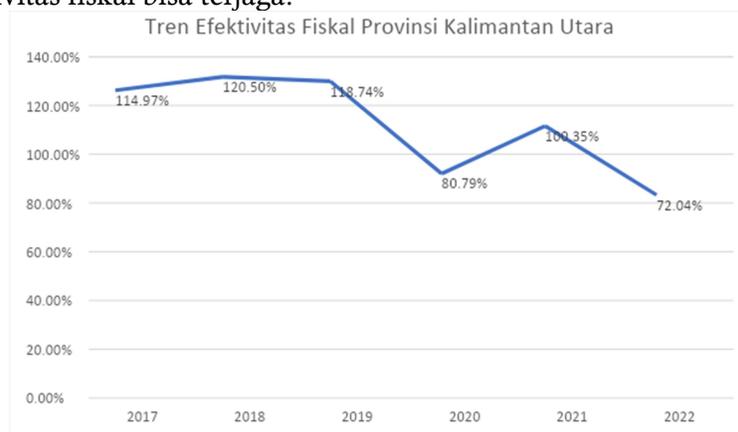


Gambar 2. Tren Ketergantungan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2022)

Pada bagian akhir, yakni Efektivitas Fiskal di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa, secara presentase rata-rata berkisar pada angka 101,23% yang berarti sangat efektif dalam pelaksanaannya, akan tetapi perlu adanya peningkatan yang

dimana pembentukan pola-pola yang konstruktif pada anggaran dan pengelolaannya sehingga efektivitas fiskal bisa terjaga.



Gambar 3. Tren Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara
 Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2022)

Perlu dipahami juga bahwa peranan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di suatu daerah memainkan pola identifikasi anggaran yang berarti, anggaran yang diperoleh benar-benar berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditentukan, oleh karena itu hasil yang akan diperoleh bisa memaksimalkan pada penyelenggaraan program-program pemda dengan prinsip alokasi dana yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam implementasinya.

Semakin besar tingkat Efektivitas Fiskal daerah yang dikelola akan berdampak pada kontribusi daerah dalam mengelola anggaran yang ada dengan begitu harapan sukses dalam pengelolaannya sejalan dengan tujuan yang direncanakan oleh daerah itu sendiri. Berdasarkan pada pembagian prinsip yang ada yakni, sisi penerimaan daerah akan memperoleh kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan pajak.

Serta jenis pengeluaran, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan besar pada pengelolaan dana perimbangan. intinya pembagian yang diberikan kepada daerah dalam pengelolaan keuangan daerah itu didasarkan pada jenis dana perimbangan yang ada dan ditentukan oleh daerah sendiri untuk melaksanakan kewenangan peraturan perundang-undangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dideskripsikan dalam bentuk deskriptif berdasarkan data yang tersedia. Lalu penggunaan data yang dipakai berupa data sekunder dari sumber data yang didapatkan, yakni data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang di *publish* di *website* data DJPK Kementerian Keuangan melalui postur APBD. Kemudian penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara dengan formulasi perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Ketergantungan Fiskal dan Rasio Efektivitas Fiskal dari postur APBD pemda Provinsi Kalimantan Utara. Berikut penjabarannya:

Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal menjelaskan nilai indeks KF bervariasi dari 0 (Semua pengeluaran dibiayai dari transfer serta tidak ada peran dari PAD), dan angka 1 (Semua pengeluaran dibiayai oleh PAD dan peran transfer tidak ada). Maka rendah perolehan nilai IKF berarti kurang mandiri, sebaliknya jika nilai IKF semakin besar berarti daerah sudah mandiri (Sampurna, 2018). Formulasi perhitungan sebagai berikut (Tim Fisipol UGM & Balitbang Depdagri dalam Taufick, 2016):

$$RKF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Kemandirian Fiskal

No	Nilai KF	Keterangan
1.	$0,00 \leq KF < 0,25$	Belum Mandiri
2.	$0,25 \leq KF < 0,50$	Menuju Kemandirian
3.	$0,50 \leq KF < 0,75$	Mandiri
4.	$0,75 \leq KF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: Sampurna (2018)

Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan Fiskal diformulasikan dengan cara membandingkan tingkat penerimaan dana negara (transfer) dengan total PAD. Formulasi perhitungan untuk menghitung rasio ketergantungan fiskal keuangan pemda sebagai berikut (Mahmudi, 2010).

$$RKF = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Ketergantungan Fiskal

No	Nilai KF (%)	Keterangan
1.	<10,00	Sangat Rendah
2.	10,00 – 20,00	Rendah
3.	20,00 – 30,00	Sedang
4.	30,00 – 40,00	Cukup
5.	40,00 – 50,00	Tinggi
6.	>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi, 2010

Efektivitas Fiskal

Efektivitas Fiskal berhubungan antar hasil yang diharapkan dengan apa yang ingin dicapai. Jika PAD menunjukkan kemampuan pemda dalam merealisasi targetnya akan berdampak pada hasil yang dicapai, semakin besar hasil yang diperoleh maka besar tingkat efektivitasnya, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil yang diperoleh maka kecil tingkat efektivitasnya. Berikut formulasi perhitungan fiskal:

$$EF = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klasifikasi Efektivitas Fiskal

No	Nilai EF (%)	Keterangan
1.	> 100	Sangat Efektif
2.	100	Efektif
3.	90 – 99	Cukup Efektif
4.	75 – 89	Kurang Efektif
5.	< 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019) dalam Fornia et al., (2021)

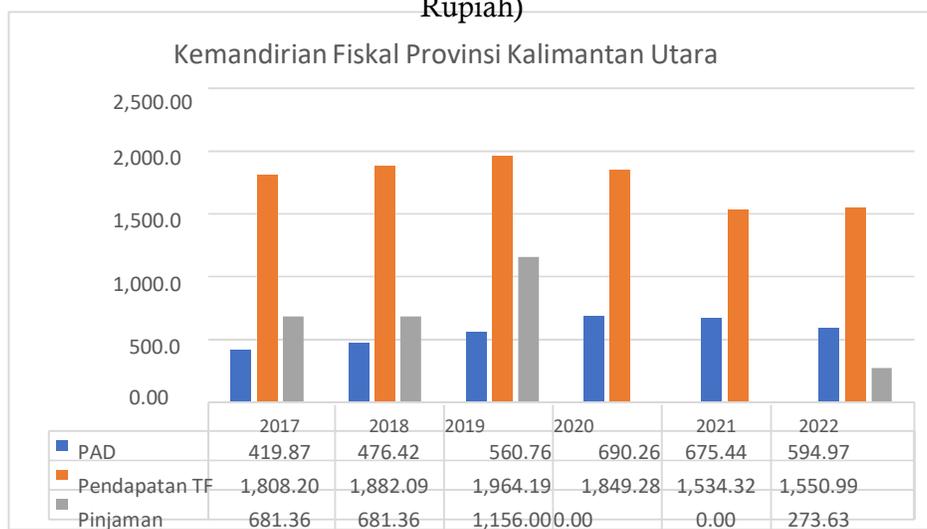
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2022 dimaksudkan, untuk melihat dan mengamati sejauh mana dalam kurun waktu 6 tahun itu pemda Provinsi Kalimantan Utara mengelola tingkat kemandirian, ketergantungan dan efektivitas fiskal daerahnya. Penggunaan data dalam penelitian ini yaitu postur APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan periode yang ditentukan.

Data ini akan mengungkapkan apakah tingkat Kemandirian, Ketergantungan dan Efektivitas Fiskal pemda Provinsi Kalimantan Utara berada pada level positif atau negatif yang didasarkan dengan klasifikasi perhitungan, sehingga bisa menguji apakah sesuai dengan data yang ada. Ini berkenaan dengan aktivitas finansial pemerintah yang mendeskripsikan bahwa penggunaan cara-cara untuk membiayai belanja itu sendiri dapat diamati melalui Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal dengan rincian yang dipakai sebagai landasan menguji tingkat dan level yang ada di suatu daerah yang menerapkan desentralisasi fiskal itu sendiri. Kemudian penggunaan data di penelitian ini berupa data sekunder postur APBD Provinsi Kalimantan Utara, yang diakses melalui *website* DJPK Kemenkeu yang di *publish*. Untuk menganalisa tingkat Kemandirian, Ketergantungan dan Efektivitas Fiskal maka peneliti melakukan perhitungan terhadap seluruh variabel yang diuraikan sebagai berikut:

Kemandirian Fiskal

Grafik 1. Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2022

Berdasarkan hasil Kemandirian Fiskal pada Grafik 1, terlihat bahwa PAD Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2022 mengalami perubahan yang fluktuatif dimulai dari tahun 2017-2018 sebesar Rp.419,87-Rp.476,42 Miliar kemudian naik pada tahun 2019-2020 sebesar Rp.560,76-Rp.690,26 Miliar dan mengalami penurunan kembali sebesar Rp.675,44-Rp.594,97 Miliar ditahun 2021- 2022. Kemudian sisi Pendapatan TF juga terlihat fluktuatif juga dimana pada tahun 2017-2018 sebesar Rp.1.808,20-1.882,09 Miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp.1.964,19 dan sedikit menurun pada tahun 2020 sebesar Rp.1.849,28 Miliar, dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp.1.534,32 dan naik kembali pada tahun 2022 sebesar Rp.1.550,99 Miliar.

Belanjut pada aspek Pinjaman dimana dapat diamati mengalami perubahan fluktuatif pula dimana pada tahun 2017-2018 terlihat sama persis sebesar Rp.681,36 Miliar, lalu meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp.1.156,00 Miliar dan pada tahun 2020-2021 terlihat tidak adanya pinjaman, namun pada tahun 2022 terlihat adanya pinjaman kembali sebesar Rp.273,63 Miliar dimana ini terjadi penurunan dari tiga tahun sebelumnya.

Tabel 4. Perhitungan Kemandirian Fiskal (PFK) Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan TF	Pinjaman	Rasio KF
2017	419,87	1.808,20	681,36	0,17
2018	476,42	1.882,09	681,36	0,19
2019	560,76	1.964,19	1.156,00	0,18
2020	690,26	1.849,28	0,00	0,37
2021	675,44	1.534,32	0,00	0,44
2022	594,97	1.550,99	273,63	0,33
Rata-rata Kemandirian Fiskal (RRKF)				$\leq 0,28$

Sumber: Data diolah

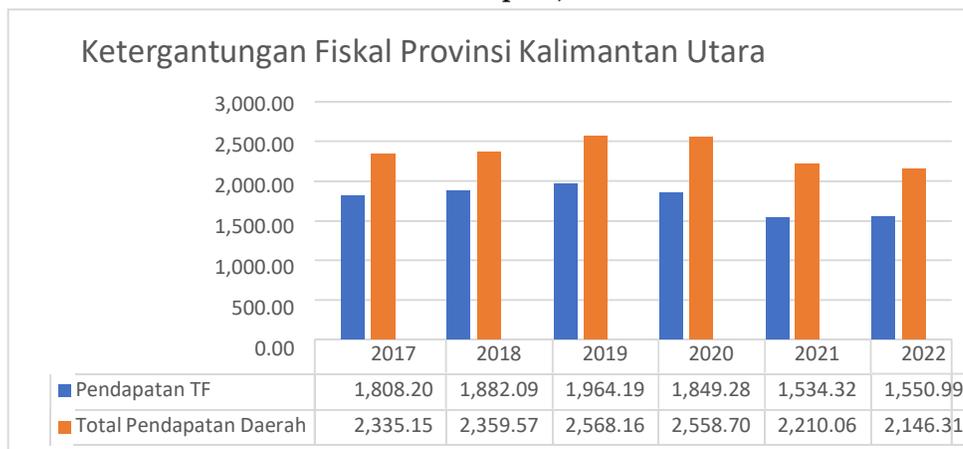
Oleh karena itu hasil perhitungan tabel 4 diatas, kemandirian fiskal periode 2017-2019 terjadi peningkatan dari 0,17-0,18 kemudian pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 0,37-0,44 dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 0,33. Dari tinjauan Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2022 secara rata-rata berada pada posisi $\leq 0,28$ ini menunjukkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dikategorikan menuju kemandirian.

Keadaan ini menggambarkan bahwa sisi PAD, Pendapatan TF dan Pinjaman terlihat mengalami perubahan fluktuatif tiap tahunnya. Dengan begitu secara formulasi perhitungan dan hasil yang diperoleh dari Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara masih selaras dengan *First-Generation Theory* dimana peranan pemerintah pusat kepada daerah masih terlihat dengan beberapa detail objek yang menjadi konsentrasi peneliti melihat PAD, Pendapatan TF dan Pinjaman yang dilakukan oleh daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya.

Serta mengelola sebagian dana atau anggaran yang diperoleh dari eksternal atau diluar daerah, sehingga tingkat Kemandirian Fiskal yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara yang awalnya belum mandiri berusaha perlahan menuju kepada kemandirian yang didukung peranan pusat kepada daerah dalam mengintervensi Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data yang diperoleh.

Ketergantungan Fiskal

Grafik 2. Ketergantungan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2022

Berdasarkan hasil Ketergantungan Fiskal pada Grafik 2, dapat dideskripsikan. Berdasarkan hasil perhitungan Ketergantungan Fiskal pada tabel 5, dapat dideskripsikan pada tahun 2017-2018 Pendapatan Transfer terlihat sama persis mengalami kenaikan selama dua tahun berlangsung sebesar Rp.1.808,20- Rp.1.882,09 Milliar, kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dari Rp.1.964,19-1.849,28 Milliar, sedangkan pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp.1.543,32 Milliar dan kembali naik pada tahun 2022 sebesar Rp.1.550,99 Milliar.

Lalu pada bagian Total PAD tahun 2017-2018 terlihat sama persis mengalami kenaikan sebesar Rp.2.335,15-Rp.2.359,57 Milliar, sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami perubahan yang fluktuatif sebesar Rp.2.568,16- Rp.2.558,70 Milliar, dan ditahun 2021-2022 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp.2.210,06-Rp.2.146,31 Milliar.

Tabel 5. Perhitungan Ketergantungan Fiskal (PFK) Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Transfer	Total PAD	Rasio KF (%)
2017	1.808,20	2.335,15	77,43
2018	1.882,09	2.359,57	79,76
2019	1.964,19	2.568,16	76,48
2020	1.849,28	2.558,70	72,27
2021	1.543,32	2.210,06	69,42
2022	1.550,99	2.146,31	72,26
Rata-rata Ketergantungan Fiskal (RRKF)			74,60%

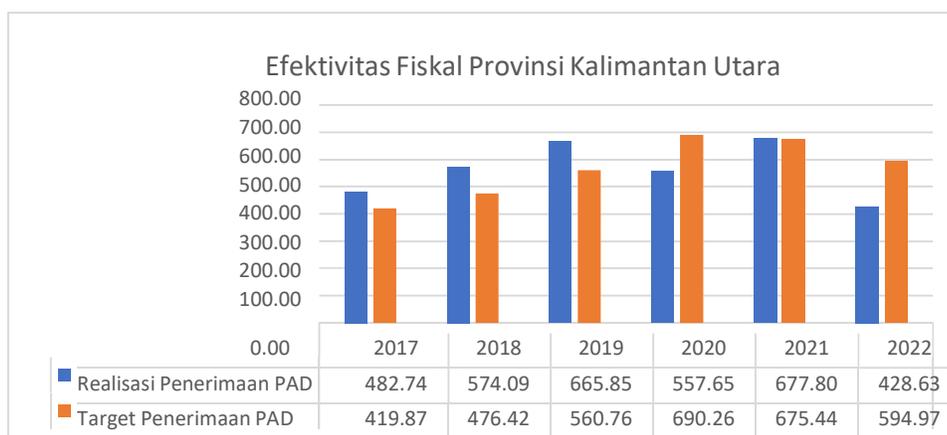
Sumber: Data diolah

Oleh karena itu dalam melihat tabel 5 diatas Ketergantungan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara dimana pada tahun 2017-2020 mengalami perubahan fluktuatif dari 77,43%- 72,27% dan ditahun 2021 cenderung turun menjadi 69,42% dan kembali naik pada tahun 2022 sebesar 72,26%, maka dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata Ketergantungan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2017-2022 berada pada posisi 74,60% yang dikategorikan masih sangat tinggi ketergantungan fiskalnya.

Kemudian membuktikan kembali bahwa pengaruh *First-Generation Theory* masih berlaku dalam tinjauan Ketergantungan Fiskal pemda Provinsi Kalimantan Utara yang dimaksudkan intervensi pemerintah pusat kepada pemda Provinsi Kalimantan Utara melalui Pendapatan Transfer (Eksternal) dan Total PAD masih sangat tinggi dalam prakteknya sesuai dengan data dan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dalam melihat aspek Ketergantungan Fiskal pemda Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan periode 2017- 2022.

Efektivitas Fiskal

Grafik 3. Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data olah 2022

Hasil Efektivitas Fiskal pada Grafik 3, mendeskripsikan Realisasi Penerimaan PAD pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp.482,74-Rp.574,09 Milliar, lalu terjadi perubahan secara fluktuatif pada tahun 2019-2020 dimana terlihat sebesar Rp.665,85-Rp.557,65 Milliar, kemudian ditahun berikutnya terjadi perubahan fluktuatif pula sebesar Rp.677,80-Rp.428,63 Milliar. Pada bagian Target Penerimaan PAD ditahun 2017-2018 mengalami peningkatan bertahap sebesar Rp.419,87-Rp.476,43 Milliar, kemudian pada tahun 2019-2020 terjadi perubahan secara fluktuatif naik sebesar Rp.560,76-690,26 Milliar, ditahun berikutnya yakni 2021-2022 terjadi perubahan fluktuatif turun dari Rp.675,44-Rp.594,97 Milliar.

Tabel 6. Perhitungan Efektivitas Fiskal (PEF) Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio EF (%)
2017	482,74	419,87	114,97
2018	574,09	476,43	120,50
2019	665,85	560,76	118,74
2020	557,65	690,26	80,79
2021	677,80	675,44	100,35
2022	428,63	594,97	72,04
Rata-rata Efektivitas Fiskal (RREF)			101,23%

Sumber: Data diolah

Dengan begitu tabel 6 diatas, menjabarkan hasil perhitungan pada Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan tahunnya dimana pada tahun 2017-2018

mengalami kenaikan secara presentase sebesar 114,97%-120,50% dan tahun berikutnya antara 2019-2020 mengalami penurunan secara fluktuatif sebesar 118,74%-80,79%, lalu ditahun 2021 juga mengalami perubahan secara fluktuatif naik 100,35% dan turun kembali diakhir tahun 2022 diposisi 72,04%.

Dapat disimpulkan dengan data yang ada bahwa tingkat Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2022 secara rata-rata berada pada posisi 101,23% yang berarti sangat efektif dalam pelaksanaannya, kemudian dengan ini juga membuktikan bahwa *First-Generation Theory* masih ada pengaruhnya dalam Efektivitas Fiskal di pemda Provinsi Kalimantan Utara secara langsung, diartikan pemda sudah optimal dengan bantuan pemerintah pusat dalam melaksanakan Realisasi Penerimaan PAD dan Target Penerimaan PAD didasarkan pada perhitungan Efektivitas Fiskal dengan periode yang ditentukan yaitu tahun 2017- 2022.

KESIMPULAN

Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2022 dari hasil perhitungan dan klasifikasinya dengan variabel yang ada, menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Kemandirian Fiskal (KF) selama periode 2017-2022 mengalami perubahan yang fluktuatif tiap tahunnya, dan secara rata-rata tingkat Kemandirian Fiskal yang diperoleh sebesar $\leq 0,28$ yang mendeskripsikan bahwa Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara dikategorikan menuju kemandirian. Situasi ini menunjukkan bahwa adanya tindakan intervensi pemerintah pusat kepada pemda dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berkaitan dengan Kemandirian Fiskal.
2. Dilihat dari Ketergantungan Fiskal (KF) selama periode 2017-2022 juga cenderung mengalami perubahan yang fluktuatif, rata-rata secara presentase yang diperoleh sebesar 74,60% yang dikategorikan masih sangat tinggi tingkat ketergantungan fiskalnya. Ini juga menggambarkan bahwa pengaruh pemerintah pusat kepada pemda Provinsi Kalimantan Utara masih berlaku dalam prakteknya, meskipun tren yang ada itu terlihat berada pada level sangat tinggi dan menjadikan tantangan tersendiri bagi pemda untuk dapat mengubah pola ketergantungan dalam hal fiskal daerah.
3. Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2022 jika ditinjau dari trennya mengalami perubahan yang fluktuatif tiap tahunnya, meskipun ada terjadi tren positif dalam kurun waktu 2017-2019 yang dimana ada peningkatan yang baik dengan hasil yang sangat efektif, namun perolehan secara rata-rata sebesar 101,23%, yang dikategorikan sangat efektif dalam pelaksanaannya dan ini menjadikan pemda Provinsi Kalimantan Utara sudah efektif dalam mengelola efektivitas fiskal daerahnya.
4. Berdasarkan hasil perhitungan dengan variabel Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal menunjukkan adanya pengaruh *First-Generation Theory* dimana secara umumnya praktik intervensi pemerintah pusat kepada pemda Provinsi Kalimantan Utara masih ada dan berlaku selama periode 2017-2022 yang artinya selama 6 tahun itu pemda Provinsi Kalimantan Utara masih di intervensi dalam hal mengelola fiskal daerahnya dengan aspek kemandirian, ketergantungan dan efektivitas fiskal daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo, A. G. (2021). Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat. *Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), 1–7. <http://dx.doi.org/10.32830/jfres.v4i2.60> J FRES Journal of Fiscal and Regional Economy Studies <http://jfres.unipa.ac.id/index.php/jfres/index> Perkembangan
- Digdowiseiso, K. (2015). *Sistem Keuangan Publik* (M. S. P. D. H. E. Sugiyanto (ed.)). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Fornia, E., Mukhzarudfa, M., & Gowon, M. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI*, 6(1), 34–44.
- Jeddawi, M. F. H. (2021). Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3(2), 51–57. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/download/2065/1001>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.
- Laraga, F., Usu, I., & Lamuda, I. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3222–3229. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3387>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI OFFSET.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://www.jstor.org/stable/2564874>
- Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analysis of Regional Financial Independence Belu Regency. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>
- Sampurna, A. F. (2018). *Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal*.
- Sofa, G. K. (2021). Factors Affecting the Fiscal Decentralization of Local Governments. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 181–192. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1823>
- Taufick, A. I. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Provinsi Timur Tahun 2009-2013. *Jurnal Ilmiah*, 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.